

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan setiap daerah di Indonesia sejalan dengan munculnya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Otonomi daerah menekankan pada peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Pesatnya perkembangan daerah dengan berkembangnya kegiatan perpajakan/fiscal yang memerlukan alokasi dana dari pemerintah daerah merupakan pengeluaran yang wajar dan pembangunan yang membutuhkan ketersediaan dana dalam jumlah yang besar untuk mendanai kegiatan tersebut.

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah. Optimalisasi pemerintah dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lueu Utara yakni dari objek, subjek, wajib pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transparan adalah mikanisme pengelolaan pemerintah pendapatan daerah disosialisasikan kepada mekanisme masyarakat secara terbuka.

2. Akuntabel adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang melandaskan profesionalitas, proporsionalitas, dan dapat di pertanggung jawabkan.
3. Pelayanan prima adalah mengutamakan pelayanan kepada masyarakat yang Cepat (memiliki target waktu yang jelas), Tepat (tidak salah dalam perhitungan), Mudah (prosedur tidak rumit), Murah (biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku), dan Ramah (*sipakatau'sipakalibbe*), saling menghormati, menghargai, dan beretika dalam pelayanan masyarakat).

Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan kewenangannya. Namun pada kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber utama pendanaan belanja daerah di pemerintah daerah. Kekurangan transfer dana tersebut di tutupi oleh sumber pendanaan yang unik, yaitu pendanaan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah dari bidang pajak daerah, hasil usaha daerah, hasil pengelolaan barang milik daerah orang pribadi, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Bicara terkait keberhasilan perekonomian hal ini dapat dilihat dari adanya penduduk, yang mana penduduk merupakan penggerak dari sektor-sektor perekonomian. apabila jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia lebih produktif dalam mengembangkan produksi barang dan jasa maka akan terjadi peningkatan dalam transaksi jual beli. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dan kegiatan dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan untuk

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Pertamaya, 2017).

Secara administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 Kecamatan, 7 Kabupaten, 166 Desa. Dengan luas Wilayah 7.502,58 km². Terletak pada koordinat antara 20°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Batas wilayahnya di sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan Tana Toraja dan Sulawesi Barat.

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berjumlah 302.687 jiwa dimana (laki-laki berjumlah 151.993 jiwa dan perempuan 150.694 jiwa) dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bebunta dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Rampi. Mayoritas mata pencarian penduduk Kabupaten Luwu Utara sebagai petani dengan memanfaatkan lahan untuk melakukan cocok tanam, seperti menanam padi, jagung, dan sayuran.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah berdasarkan pada permendagri No 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah di kelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum peningkatan belanja pemerintah lebih didominasi untuk fungsi pelayanan umum. Berdasarkan

klasifikasi belanja negara menurut fungsi, belanja negara di bedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum, dan fungsi ekonomi. Anggaran dan fungsi pelayanan umum tersebut antara lain mencakup: program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek.

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, belanja daerah di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang di wujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat di indentifikasikan beberapa masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian. Adapun yang menjadi pokok pembahasan masalah pada penelitian ini adalah

- a. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Luwu Utara ?
- b. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu utara ?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu Utara.
- b. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk di Kabupaten Luwu utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam penelitian yang sama dan dapat mengetahui pendapatan dan peneluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya pengembangan yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.

- b. Bagi Universitas Muhammadiyah Palopo

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi karya ilmiah yang melengkapi pengetahuan yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah rebrudusi daerah, badian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hobrouw et al.,2021). Sektor pendapatan daerah memmegang peran yang sangat penting, karna melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pemerintah dan pembangunan daerah.

Penerimaan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di artikan sebagai uang yang masuk ke kas daerah, atau penerimaan yang didapat pemerintah daerah meliputi pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah (Samu, 2005). Sedangkan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daeah yang dipisahkan, secara garis besar sumber-sumber.

penerimaan atau cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendapatkan dana

pada dasarnya dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipisahkan dengan tanpa balas jasa secara langsung dapat ditunjukkan.
- b. Retribusi adalah suatu pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembiayaan retribusi tersebut.
- c. Keuntungan dari perusahaan- perusahaan negara. Penerimaan dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara.
- d. Pinjaman. Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Jika sumber penerimaan daerah itu sendiri terus ditingkatkan guna untuk menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan bangunan yang setiap tahun meningkat sebagai kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan dengan perencanaan tujuan yang baik.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan adanya pendapatan asli daerah ini maka daerah akan lebih mandiri dalam melakukan pengelolaan keuangan dan dapat mengukur tingkat kemandirian daerah terhadap pemerintah pusat (Anggreani, 2020).

Menurut Suemiro (1992:7), Negara Indonesia mempunyai falsafah negara yang disebut pancasilah, maka dengan sendirinya falsafah pajak berdasarkan pancasilah dan tidak boleh bertentanan dengan pancasilah uang digalih dari kebudayaan rakyat Indonesia menjadi dasar hukum yang berlaku. Dasar hukum pajak diletak dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 republik Indonesia yang berbunyi segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang.

Menurut Beauty (2014), salah satu wujud kewenangan pemerintah daerah yaitu memberikan sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digalih dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi di atur dalam UU No.14 tahun 2000 dan ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya berupa PP No.65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP No.66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Pendapatan jenis pajak dan retribusi tersebut didasarkan pada pertimbangan pemungutan pajak hampir disemua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan peraktek baik.

2.2 Jumlah Penduduk

Terkait dengan keberhasilan perekonomian hal ini dapat dilihat dari adanya jumlah penduduk, yang mana penduduk merupakan penggerak dari sektor-sektor perekonomian (Oktiani, 2021:17). Apabilah jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia lebih produktif dalam mengembangka produksi barang dan jasa maka akan terjadi peningkatan dalam transaksi jual beli. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kegiatan dimana pemerintah daerah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik dalam lembaga maupun individu untuk

mengelola berbagai sumber daya yang ada dan bentuk suatu kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Ariska dan Novie, 2021).

Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak. Pajak merupakan gejala sosial, arti pajak hanya berada dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat maka tidak ada pajak. Sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Pajak-pajak didalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. pajak dapat digunakan sebagai alat untuk meratakan pendapat dengan menetapkan tarif yang progresif (Nanang, 2018).

Menurut Maier dikutip dari (Mudrajat, 1997) dikalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumber daya manusia. Terdapat 3 alasan mengapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan (Putri, 2021).

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumber daya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas manusia” semakin sulit.
2. Banyak negara dimana penduduknya masih banyak tergantung dengan sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antara sumber daya alam yang langka dan penduduk. Sebagian karena perumbuhan

penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian modern dan pekerjaan modern lainnya.

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

2.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang di susun dalam anggaran pendapatan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan kedalam dua golongan sebagai berikut:

a. Pangeluaran Rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari jumlah pegawai yaitu gaji pembayaran pegawai termasuk gaji pokok dan tunjangan, belanja barang, yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintah.

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebijakan tersebut.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Arsyad, 2015) dari definisi yang mengandung tiga unsur:

1. Pembangunan ekonomi suatu proses perubahan yang terus menerus didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
2. Usaha meningkatkan pendapatan perkapital.
3. Kenaikan pendapatan perkapital harus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi

maupun non ekonomi. Oleh sebab itu sarana pembangunan yang minimal dan pasti ada menurut (Hobrouw et al., 2021) adalah:

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa.
2. Hidup, seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan.
3. Mengangkat taraf hidup termaksud menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai manusiawi, yang semata-mata bukan hanya memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
4. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Ada empat model pembangunan (Cherilina dan Mooy, 2019) yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, semua itu bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baruh dengan upah yang layak dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai batas maksimal.

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan perkapita karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Imamah, 2015). Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Pengertian pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan yang mencakup dimensi yang lebih luas, terpadu dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu pengertian pembangunan harus dilihat sebagai dinamis dan bukan sebagai konsep statis. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Definisi ini mengandung tiga unsur yaitu :

- a. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang didalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
- b. Usaha meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah menunjukkan perannya dalam perekonomian dalam rangka mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.

Menurut Dumas pemerintah memiliki peran yaitu :

- a. Peran alokasi, yaitu peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.

- b. Peran distributif, yaitu peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya Kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
- c. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan equilibrium.
- d. Peran distimulatif, yakni peranan pemerintah dalam mengerjakan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju.
- e. Pengeluaran pemerintah secara Mikro dan Makro.

1). Teori Mikro

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pemerintah akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu :

- a) Perubahan pemerintah akan permintaan publik.
- b) Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang politik dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan.
- c) Perubahan kualitas barang publik.
- d) Perubahan harga faktor-faktor produksi.

2). Teori Makro

Teori Makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi, antara lain :

a). Hukum Wagner

Berdasarkan pengalaman empiris dari negara- negara maju (UAS, Jerman, Jepang) wagner menemukan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Meskipun demikian wagner menyadari bahwa dengan tumbuhnya perekonomian hubungan antar industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks.

Menurut wagner ada lima yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu pertama ; tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kedua; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, ketiga; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, keempat perkembangan demokrasi dan kelima; adalah ketidak efisienan biokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.

Kelemahan hukum wagner adalah hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang publik tetapi wagner berdasarkan pandangannya dengan teori organis mengenai pemerintah (*organic teori of state*) yang mengaggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

b) Teori Peacock dan Wiserman

Teori piacok dan Wiserman didasarkan pada suatu pandanan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Namun masyarakat mempunyai suatu

tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut teori Peacock dan Wisermen, perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh sebab itu dalam keadaan normal, peningkatan GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya adanya perang maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu pemerintah melakukan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi berkurang. Akan tetapi perang tidak hanya bisa dibiayai dengan pajak sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melinasi utang dan membayar bunga, pengeluaran pemerintah pun kian membengkak karena kewajiban baru tersebut. Akibat lanjut ini pajak tidak turun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah usai.

c) Rostow dan Musgrave

Dimana mereka menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi menurut rasio-rasio pengeluaran pemerintah terhadap nasional relatif besar.

Tahap awal pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana selanjutnya tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu pula posisi investasi pihak swasta juga meningkat. Dalam suatu proses pembangunan, menurut Maggrave rasio investasi sosial terhadap pendapatan nasional semakin besar, namun rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Rostow berpendapat bahwa tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi terhadap pengeluaran- pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Mutiara, 2017).

Teori Rostow dan Musgrave adalah panfangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

2.3.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi. Pemerataan hasil-hasil pembangunan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi sangat penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan, selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang

pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Mamesah (1995), mengemukakan bahwa keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintah dan pembangunan dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang dilakukan oleh pembangunan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembayaran. Oleh karena itu keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas alam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografis, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat. Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu;

1. Tanggung jawab.
2. Memenuhi kewajiban keuangan.
3. Kejujuran.
4. Hasil guna.

5. Pengadilan.

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif perubahan yang di inginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo:2000):

1. Keuangan daerah harus bertumpuh pada kepentingan publik (*publik oriented*). Hal tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik. Tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Disentrelisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah, dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelola keuangan daerah, berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for monai, transparansi, dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang penduduk keuangan DPRD, kepala daerah, PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan dan bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan.
7. Perinsip pengadaan dan pengolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, Laporan keuangan, peran DPRD, peran akutan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan ranting kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batas pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna mengembangkan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akutan dan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi, sehingga mempermudah pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

2.3.2 Anggaran Pendapatan Daerah

Berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah daerah, Mamesah (1995), mengungkapkan bahwa APBD didefinisikan sebagai: “rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan pemerkiraan setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek- proyek daeah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran- pengeluaran yang dimaksud”.

Menurut (Morohah, 2019), anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya sumber penerimaan yang yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubung dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.

2. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
3. Priode anggaran yaitu, biasanya 1 (satu) tahun.

Direktorat jendral perimbangan keuangan pusat dan daerah Dipertemen keuangan Republik Indonesia (2004) mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBD dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Dalam (Khilyatizam, 2016) mengatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa belanja negara belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, maka dilakukan perencanaan dari segi penerimaan maupun pengeluarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang menutamakan upaya mencapai hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Tampubolon, 2014).

Menurut Tampubolon (2014), APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sasaran yang dihadapkan menurut fungsi belanja.
- 2) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan standar pelayanan yang dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan politik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab atas dasar tersebut, penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran (Irmal, 2016).

2.3.4 Belanja Daerah

Pengeluaran daerah (Belanja Daerah) diklasifikasi menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi, dan kelompok belanja. Belanja daerah menurut urusan pemerintah terdiri atas belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah menurut fungsinya digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat seperti: pelayanan umum, ketertiban dan

keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas hidup, kesehatan pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 14, Belanja Daerah (BD) adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengeluaran belanja berbeda dengan pengeluaran pembiayaan. Perbedaan tersebut terletak pada ada atau tidaknya pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Pemerintah daerah tidak akan mendapatkan pembayaran kembali pembayarannya pada tahun berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali pembayarannya pada tahun anggaran belanja atau pada tahun anggaran berikutnya (Nisya et al, 2019). Menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, struktur belanja daerah yang digunakan dalam APBD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu ;

1. Belanja Operasi (BO)

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Dan Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal (BM)

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah yang memiliki kriteria sebagai berikut: Nilai rupiahnya

meterial sesuai dengan kebijaksanaan akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja tanah,

belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja Aset tetap dan belanja aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

2.4. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil peneltian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan serta memperjelas pembahasan dalam penelitian. Berikut ini adalah uraian singkat dari hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Metode Analisis/ Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dinda faradillah (2017) Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan populasi terhadap pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/ Kota provinsi Kalimantan Timur	Pengaruh variabel digunakan model fixed effect dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan kurun waktu 7 tahun (2010-2016) dan terdiri dari 9 Kabupaten/ Provinsi Kalimantan Timur.	PAD Dan dana primbangan secara simultan dan parsial dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah melalui belanja langsung,tetapi pada variabel populasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten/ Provensi kalimantan Timur.

No	Nama Dan Judul	Metode Analisis/ Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Kalimantan Timur masih bergantung pada dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai sumber pendanaan paling besar dalam menjalankan otonomi daerahnya.
2	Muhammad Saleh, tahun (2016) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan dikabupaten kutai timur.	Data yang digunakan model regresi linear berganda memiliki variabel penduga lebih dari satu, yaitu X1 sampai dengan X2 maka variabel dependen yang di pengaruhi variabel independen.	Berdasarkan hasil regresi yang di hitung dengan menggunakan SPSS maka ditemukan konstanta dengan nilai =3.963 yang diartinya bahwa pada saat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak mengalami atau tidak mengalami signifikan yang positif maupun penurunan maka indeks pembangunan manusia sebesar 3.963 persen.
3.	Evi Adriani (2016) Pengaruh PRDB Dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten marangin.	Jumlah penduduk sangat kuat dengan PAD dan model yang diestimasi adalah tepat.	Produk domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan jumlah penduduk mempunyai hubungan negatif dan pengaruhnya tidak signifikan secara parsial terhadap PAD Kabupaten marangin selama periode 1991/2006.

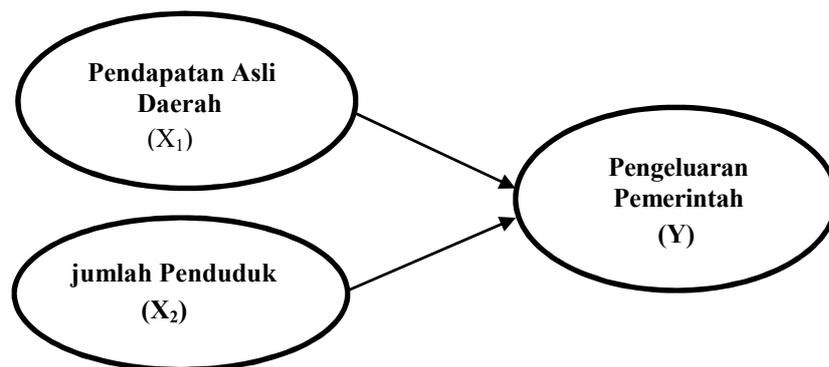
No	Nama dan Judul	Metode Analisis/ Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Muh Ikram Idrus dan Irma 2017 Pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Makassar	Secara simultan atau bersama-sama kedua Variabel X (Pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Pendapatan asli daerah) dengan tingkat signifikan 0,028 ($0,028 < 0,05$).	Hasil dari pengujian statistik ternyata secara parsial variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikan 0,602 ($0,602 > 0,05$). Dan Variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikan 0,019 ($0,019 < 0,05$).
5.	Devita, Indri, Delisa, Arman (2014) pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota provinsi Jambi	Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data dari APBD dan jumlah penduduk. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross section	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan penduduk memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan atau peningkatan belanja langsung kabupaten/kota di provinsi Jambi.
6.	Fitri Yeni (2019) Analisis pengaruh pendapatan daerah dan pengeluaran belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Siak	Jenis penelitian ini menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional	Adanya perumbuhan ekonomi yang merupakan induksi keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi

No	Nama dan Judul	Metode Analisis/ Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan prekonomian dari suatu negara atau wilayah.
7.	Ririn Angraeni (2017) Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana primbangan terhadap belanja daerah pare-pare	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian pendekatan kausalitas.	Penelitian kausalitas adalah penelitian yang di desain untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat variabel yan pada umumnya sudah dapat menyatakan klasifikasi variabel penyebab variabel antara dan variabel terikat.
8.	Toni Kussetiono Irawan (2016) Analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi jawa tengah	Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang	Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai oleh potensi yang di miliki masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan.
9.	Nur fadillah arsyad (2018) Penaruh pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah di kota makassar	Berdasarkan klasifikasi belanja negara menurut fungsi belanja negara dibedakan menjadi belanja untuk fungsi Pelayanan ekonomi.	Anggaran fungsi pelayanan umum tersebut antara lain mencakup, program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian

No	Nama dan Judul	Metode Analisis/ Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			negara/lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, progra penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan ibtek.
10.	Nur Baeti (2017) Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia Kabuoaten/Kota di provinsi jawa tengah	Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder yang bersumber pada laporan badan pusat statistik (BPS) tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, data yang diteliti merupakan data pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM)	Pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan segnifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan segnifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah, dan alokasi pengangguran positif dan segnifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah. Pengangguran pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama- sama berpengaruh terhadap pembangunan.

2.4.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterahkan rakyat melalui bermacam-macam program. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang akan diambil. Kerangka pemikiran teori tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar. Kerangka Konseptual

2.4.2 Hipotesis

Berdasarkan uraian permasalahan, teori, konsep, serta kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten Luwu Utara.
2. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses penelitia yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang mengamati dan perilaku yang diamati.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengukur atau menentukan hubungan antara variabel-variabel dalam sebuah populasi dimana dalam penelitian yaitu untuk mengukur hubungan variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerinta di Kabupaten Luwu Utara.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Utara tepatnya di kantor BAPENDA (Badan Pendapatan Dearah) dan kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara. Alasan peneliti memilih Kabupaten Luwu Utara tersebut sebagai tempat pelaksanaan penelitian disebabkan lokasi yang strategis. Lingkungan cukup mendukung untuk dilaksanakan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yakni pada bulan April 2023 sampai dengan Juni.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten Luwu Utara.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono,2014). Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Jumlah Penduduk yaitu lima tahun terakhir dari tahun 2012-2021 di Kabupaten Luwu Utara. Kreteria yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu tingkat pengeluaran pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten Luwu Utara dalam kurun waktu 2012-2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu Analisis data secara induktif (mengacu pada temuan lapangan), Deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka),

Penelitian ini juga termaksud dalam desain yang bersifat sementara (desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan) dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar penelitian dengan sumber data).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden . Dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada masyarakat berdasarkan daftar pernyataan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah di Kabupaten Luwu Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada, baik dari tulisan atau dokumen, seperti laporan atau catatan arsip yang dapat mendukung data primer, kerangka ilmiah, jurnal- jurnal dari pakar penelitian atau hasil- hasil penelitian ataupun hasil-hasil penelitian yang ada.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dala penelitian ini adalah:

1. Dokomentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara mengumpulkan data dan dokumen-dokumen yang sudah ada serta berhubungan dengan variabel penelitian, dengan tujuan untuk meneliti,

mengkaji, dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian yang akan digunakan.

2. Studi Literatur, yaitu mempelajari teori-teori yang ada atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik dari buku, karya ilmiah berupa skripsi dan sejenisnya, artikel, jurnal, internet atau bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependendalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah (Y). Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Setiap tahunnya keberbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program.

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (X_1) dan (X_2) Jumlah Penduduk. Pendapatan asli daerah dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing- masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral kedalam sektor primer, sekunder dan tersies. Sedangkan jumlah penduduk adalah jumlah keseluruhan penduduk yang berada dikecamatan ataupun kabupaten.

3.7 Tehnik Keabsahan Data

Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara, digunakan metode uji asumsi klasik. Metode ini bertujuan untuk mengaju hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variable yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang akan dipecahkan secara sistematis dan akurat. Metode analisis data panel dan program *Software Microsoft Excel dan E-views*.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan variabel yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbaris *Ordinary Least Square* (OLS). Uji kesumsi klasik terbagi menjadi 4 yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengaju apakah dalam model regrasi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode analisis grafik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengdeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* (JB) dengan nilai X^2 tabel dengan ketentuan jika nilai $JB > X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi tidak normal sebaliknya jika nilai $JB < X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi di temukan adanya klorasi antara variabel independent. Modal yang baik seharusnya tidak terjadi kolrelasi antara yang tinggi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya miltikolinearitas dapat dilihat dengan hasil istimewa antara variabel independen dengan membandingkan nilai *Adjusted R-Square*-nya masing-masing variabel independen.

c. Uji Heteroksedastisitas

Uji ini betujuan untuk menguji apakah pada modal regresi terjadi ketidak samaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homoksedastisitas atau tidak terjadi homoksedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya homoksedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik atau melihat *Scatrel Plot* antara lain predeksi variabel dependen dengan residual.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat di artikan sebagai kolerasi yang terjadi diantara anggota dari serangkaian observasi yang dilakukan. Adapun model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada priode t dengan kesalahan penganggu pada priode t-1 sebelumnya. Dan salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji *Durbin Watson* (D- W- test).

2. Uji Hipotesis

a. Uji persial (t)

Uji persial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung, ketika $\text{prob} < \text{taraf segnifikansi } 5\%$, maka dapat disimpulkan variabel bebas tersebut seknifikan mempengaruhi variabel terikat.

b. Uji simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai $\text{prob } F < \text{taraf signifikansi } 5\%$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama- sama berpengaruh segnifikan terhadap variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai R^2 beberapa pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang di buat dan sebaliknya.

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana di gunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan stuktur ekonomi. Adapun kesamaan regresi sederhana sebagai berikut ;

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Pengeluaran Pemerintah

A = Konstan

$b_1 b_2$ = Koefisien Regresi

x_1 = Pendapatan Asli Daerah

x_2 = Jumlah Penduduk

e = Status Error

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambar Umum Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah tingkat 2 di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara terletak di kota Masamba. Kabupaten Luwu Utara, yang dibentuk berdasarkan UU No.19 Tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukan daerah ini memiliki luas 14.447,56 km², Dengan jumlah penduduk 450.000 jiwa. Namun pada Tahun 2003 dilakukan pembentukan Kabupaten Luwu Timur, sehingga luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah 7.502,38 km² dengan jumlah penduduk 312.883 Jiwa pada Tahun 2019.

Secara administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 Kecamatan, 7 Kabupaten, 166 Desa. Dengan luas Wilayah 7.502,58 km². Terletak pada koordinat antara 2°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Batas wilayahnya di sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone dan sebelah Barat berbatasan dengan Tana Toraja dan Sulawesi Barat.

Penduduk Kabupaten Luwu Utara berjumlah 302.687 jiwa dimana (laki-laki berjumlah 151.993 jiwa dan perempuan 150.694 jiwa) dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bebunta dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Rampi.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara

1. Visi Kabupaten Luwu Utara

Luwu Utara yang religius dengan pembangunan berkualitas dan merata yang berlandaskan kearifan lokal.

2. Misi Kabupaten Luwu Utara

Selain Visi Kabupaten Luwu Utara adapun Misi Kabupaten Luwu Utara yakni sebagai berikut :

- 1). Mewujudkan masyarakat yang religius tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas, adat yang berdaya.
- 2). Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi, dan pemenuhan rumah layak huni.
- 3). Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya.
- 4). Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim, investasi dan daya tarik pariwisata.
- 5). Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.
- 6). Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah.
- 7). Mewujudkan ketertiban umum dan tingkat keamanan yang kondusif.

4.2 Geografis Kabupaten Luwu Utara

Secara Geografis Kabupaten Luwu Utara terletak pada koordinat antara 20°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Luwu Utara terletak paling Utara di Provinsi

Sulawesi Selatan yang terdiri dari pantai, datara rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 Mdpl. Wilayah Selatan berupa dataran rendah dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah berupa pegunungan dengan gunung menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Balease, Gunung Kabentonu, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan lainnya. Sejumlah sungai besar yang berada di wilayah ini antara lain Sungai Salu Rongkong, Sungai Salu Kula, Sungai Salu Baliase, Sungai Salu Karama, Sungai Salu Lodang dan lainnya.

4.3 Hasil Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memeriksa, menyelidiki, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah yang dirumuskan sebelumnya. Data dari penyebaran kuesioner dikuantifikasi sehingga dapat dievaluasi secara statistik sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah rebrudusi daerah, badian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hobrouw et al., 2021). Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat penting, karna melalui sektor ini dapat

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	Total PAD
2012	702.943.325
2013	680.000.000
2014	1.350.000.000
2015	717.000.000
2016	973.150.000
2017	102.649.065.463
2018	115.691.336.507
2019	133.037.521.547
2020	117.555.699.447.00
2021	129.702.802.072.00

Sumber : Data Primer, Badan Pendapan Daerah, Kabupaten Luwu Utara 2023

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara

Jumlah penduduk merupakan faktor yang sangat penting sebagai wajib pajak. Pajak merupakan gejala sosial, arti pajak hanya berada dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat maka tidak ada pajak. Sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Pajak-pajak didalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi.pajak dapat digunakan sebagai alat untuk meratakan pendapat dengan menetapkan tarif yang progretif.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara
Priode 2012-2021

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2012	290.290
2013	297.313
2014	299.989
2015	302.687
2016	380.967
2017	367.367
2018	325.981
2019	327.994
2020	329.586
2021	329.934

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara 2023

3. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Pengeluarn pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasih anggaran yang di susun dalam anggaran pendapatan alokasih anggaran yang disusun dalam Anggaran pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) setiap tahunnya keberbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program.

**Tabel 4.3 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
Priode 2012-2021**

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2012	818.348.891.00
2013	804.696.599.00
2014	1.392.632.617.00
2015	613.746.380.00
2016	656.355.105.00
2017	107.496.739.626,14
2018	112.679.614.314,52
2019	128.591.057.371,35
2020	107.770.050.386,55
2021	122.259.408.600,71

Sumber: Data Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Luwu Utara 2023.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah, Kabupaten Luwu Utara.

1). Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan variabel yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbaris *Ordinary Least Square* (OLS).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengaju apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode analisis grafik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* (JB) dengan nilai X^2 tabel dengan ketentuan jika nilai $JB > X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi tidak normal sebaliknya jika nilai $JB < X^2$ tabel maka residualnya berdistribusi normal.

Tabel 4.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.08157570
Most Extreme Differences	Absolute	.238
	Positive	.150
	Negative	-.238
Test Statistic		.238
Asymp. Sig. (2-tailed)		.116 ^c

a. Test distribution is Normal.

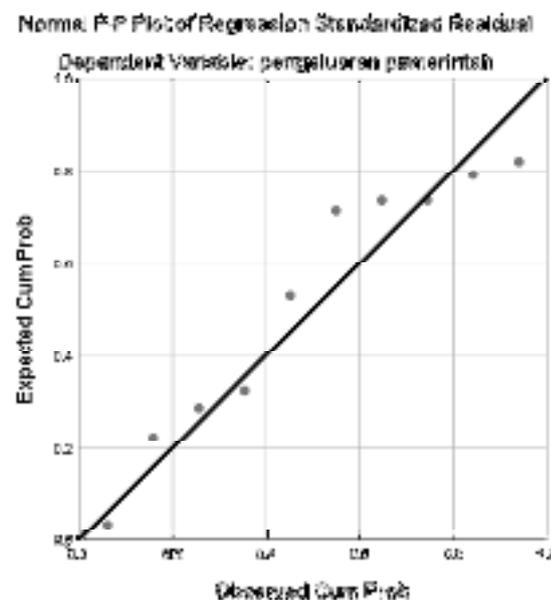
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : SPSS, Data diolah 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa data hasil Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah berdistribusi Normal. Dimana hasil data menunjukkan nilai signifikan yakni 0,116 atau dapat dilihat pada $0,116 > 0,05$. Berdasarkan uji Normalitas tersebut diperoleh Nilai “*P – Value (Sig)*” $> 0,05$.

Gambar 4.2 Grafik Normalitas



Sumber : SPSS, Data diambil 2023

Berdasarkan gambar 4.2 terlihat bahwa tersebar secara diagonal mengikuti garis histogram. Maka pengambilan keputusan, Jika data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti grafik histogram maka plot distribusi normal.

b. Uji Multikolinear

Multikolinier adalah situasi adanya kolerasi variabel- variabel independen antara satu dengan lainnya. Uji ini bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi di temukan adanya klorasi antara variabel independent. Modal yang baik seharusnya tidak terjadi kolrelasi antara yang tinggi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya miltikolinearitas dapat dilihat dengan hasil istimasi antara variabel independen dengan membandingkan nilai *Adjusted R-Square*-nya masing-masing variabel independen.

Tabel 4.4 Uji Multikolinear

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	pendapatan asli daerah	.924	1.082
	jumlah penduduk	.924	1.082

a. Dependent Variable: pengeluaran pemerintah

Sumber : SPSS data diambil 2023

Berdasarkan tabel 4.4 Uji multikolinear menunjukkan nilai VIF sebesar 1.082 yang artinya nilai VIF < 10 dan nilai Toleransi 0,924 yang artinya antara 0 dengan 1 sehingga dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas. Pada variabel lingkungan kerja nilai VIF sebesar (1.082) yang artinya nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance (0,924) yang artinya diantara 0 dengan 1 sehingga dapat dikatakan tidak ada multikolinear.

c. Uji Heteroksedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada modal regresi terjadi ketidak samaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah

homokedastisitas atau tidak terjadi homokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya homokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik atau melihat *Scatrel Plot* antara lain predeksi variabel dependen dengan residual.

Tabel 4.5 Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	80.209	40.783		1.967	.090
	pendapatan asli daerah	-.016	.068	-.072	-.230	.825
	jumlah penduduk	-13.253	7.109	-.583	-1.864	.105

a. Dependent Variable: abresd

Sumber : SPSS data diambil 2023

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat di artikan sebagai kolerasi yang terjadi diantara anggota dari serangkaian observasi yang dilakukan. Adapun model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan penganggu pada priode t dengan kesalahan penganggu pada priode t-1 sebelumnya. Dan salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji *Durbin Watson* (D- W-).

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.919 ^a	.844	.800	4.62807	2.247

- a. Predictors: (Constant), jumlah penduduk, pendapatan asli daerah
 b. Dependent Variable: pengeluaran pemerintah

Sumber: SPSS, data diambil 2023

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi pada tabel di atas, menyatakan bahwa nilai Durbin Watson 2.247 berada di antara -2 dan 2 yang menyatakan terjadi gejala Autokorelasi.

2). Uji Hipotesis

Adapun pengujian yang di gunakan dalam menentukan Uji Hipotesis seperti sebagai berikut :

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai R^2 beberapa pada rentang 0-1. Semakin tinggi angka tersebut maka semakin baik model yang di buat dan sebaliknya. Bila R^2 mendakati 1 (100%), maka hasil perhitungan garis regresi yang diperoleh tepat. Sebaliknya jika nilai R^2 mendekati 0 maka hasil perhitungan garis regresi yang diperoleh tidak tepat untuk mengukur data observasi.

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson Sig. F Change
1	.919 ^a	.844	.800	4.62807	2.247

a. Predictors: (Constant), jumlah penduduk, pendapatan asli daerah

b. Dependent Variable: pengeluaran pemerintah

Dari hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai R Square mendekati angka 1 yaitu 0,844 (84,4 %). Hal tersebut membuktikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

b. Uji persial (t)

Uji persial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t hitung, ketika prob < taraf segnifikansi 5%, maka dapat disimpulkan variabel bebas tersebut seknifikan mempengaruhi variabel terikat. Uji ini di lakukan dengan perbandingan t hitung dan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

H0 diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$

H1 diterima jika $t \text{ hiting} > t \text{ tabel}$ untuk $\alpha = 5\%$

4.8. Hasil Uji T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-134.690	100.869		-1.335	.224
	pendapatan asli daerah	.911	.168	.841	5.416	.001
	jumlah penduduk	23.152	17.582	.204	1.317	.229

a. Dependent Variable: pengeluaran pemerintah

Berdasarkan Tabel di atas diketahui hasil t hitung sebagai berikut:

- 1) Nilai t hitung variable PAD sebesar 5.416, pada tabel distribusi 5% (0,05) nilai t tabel yakni sebesar 2.365. Maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.416 > 2.365$), yang artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikan ($0,001 < 0,05$). Maka dapat diartikan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.
- 2) Nilai t hitung variabel Jumlah Penduduk sebesar 1.317, pada tabel distribusi 5% (0,05) nilai t tabel yakni sebesar 2.365. Maka nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.317 < 2.365$), yang artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikan ($0,229 > 0,05$). Maka dapat diartikan bahwa Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

c. Uji Regresi Berganda

Tabel 4.9 Uji Regresi Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	134.690	100.869		-1.335	.224
	pendapatan asli daerah	.911	.168	.841	5.416	.001
	jumlah penduduk	23.152	17.582	.204	1.317	.229

a. Dependent Variable: pengeluaran pemerintah
 Sumber : SPSS data diambil 2023

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis regresi linear berganda pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = 134.690 + 0,911X_1 + 23,152X_2$$

Hasil pada tabel dan rumusan masalah regresi diatas, maka dapat diartikan sebagai berikut :

1. Nilai (a) konstan sebesar 134.690 atau sama dengan Nol artinya apabila tidak ada Pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk maka pengeluaran pemerintah akan naik sebesar 134.690.
2. Koefisien b_1 sebesar 0,911, artinya setiap ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 1.Rp akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0,911.
3. Koefisien b_2 sebesar 23,152 artinya apabila jumlah penduduk bertambah 1 orang maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara akan naik sebesar 23,152.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,911. Pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan sebesar 134.690 dan jumlah penduduk dari hasil penelitian sebesar 0,844.

Berdasarkan estimasi linear berganda menunjukkan bahwa uji t dalam variabel jumlah penduduk nilai t hitung Nilai t hitung variabel Jumlah Penduduk sebesar 1.317, pada tabel distribusi 5% (0,05) nilai t tabel yakni sebesar 2.365. Maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1.317 < 2.365$), yang artinya H_1 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini diperkuat dengan nilai signifikan ($0,229 > 0,05$). Maka dapat di artikan bahwa Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Hal ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2008).

Berdasarkan estimasi linear berganda menunjukkan bahwa Nilai t hitung variable Pendapatan Asli Daerah sebesar 5.416, pada tabel distribusi 5% (0,05) nilai t tabel yakni sebesar 2.365. Maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5.416 > 2.365$), yang artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini di perkuat dengan nilai signifikan ($0,001 < 0,05$). Maka dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agraeni (2019).

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara Dieroleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan

Retribusi Perizinan. Anggaran Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, pada bidang pertanian telah dialokasikan program peningkatan peningkatan alokasi pertanian serta program penyuluhan pertanian. Pada anggaran Pengeluaran Pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pertanian pada saat ini memang sudah baik untuk masyarakat dan memiliki peran pertumbuhan ekonomi. Tetapi masih ada beberapa permasalahan disektor pertanian yakni dimana bahan pupuk pertanian yang menjulang tinggi sehingga banyak pertanian yang pertumbuhannya belum maksimal dan adanya perusahaan yang memakai sektor pertanian masyarakatan yang membuat sektor pertanian di kecamatan masamba berkurang. Tetapi masih ada beberapa daerah yang sektor pertaniannya terjaga, seperti Rampi dan Rongkong dimana sektor pertaniannya masih terjaga baik.

Pada Industri rumah tangga ataupun industri pada level kecil yang menengah yang masih membutuhkan bantuan pemerintah khususnya pendanaan investasi usaha menengah kecil. Selain masalah pendanaan untuk meningkatkan modal usaha, masih banyak kekurangan yang dimiliki seperti minimnya sumber daya manusia yang masih mengandalkan pola-pola tradisional dalam aktifitas mereka dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk untuk mengembangkan jati diri di sektor usaha menengah kecil. Selain itu pendidikan serta *workshop* bagi *stakeholder* di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pengembangan sektor industri di Kabupaten Luwu Utara sebaiknya di arahkan pada industri yang memiliki daya saing yang tinggi dan bertumpuh pada SDM

yang kuat. Dengan demikian jika hal tersebut di kembangkan maka sektor peindustrian dan perdagangan dapat menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan perekonomian.

Penelitian yang dilakukan pada Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dalam waktu 10 tahun membuat aktivitas produksi maupun penggunaan kendaraan sehingga hasil pajak masyarakat meningkat dan di tambah dari anggaran daerah dari pemerintah yang semakin meningkat dalam program perkembangan Kabupaten Luwu Utara. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah tetapi juga berpengaruh pengeluaran- pengeluaran masyarakat dikarenakan setiap tahun mengalami kenaikan pajak dan Pendapatan Asli Daerah yang lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran pemerintah.
2. Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, sebagai penulis menyarankan bahwa hal-hal yang diperlukan pentingnya meningkatkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana keuangan yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu daerah. Adapun beberapa usulan yang dianjurkan yakni :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendukung kebijakan pemerintah di sektor yang baik salah satunya di sektor pajak, retribusi daerah dan pendapatan yang sah demi kemajuan perekonomian Masyarakat kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sangat di harapkan untuk mengembangkan potensi-potensi dan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah atau pembangunan perekonomian Kabupaten Luwu

Utara sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menambah penghasilan daerah.

3. Saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambah potensi penelitian di sektor bidang lainnya untuk lebih mengetahui prekonomian Kabupaten Luwu Utara di tahun yang akan mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariska Oktiani, & Novie Al Muhariah. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, 1(1).
- Asri mutiara. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal*. Universitas pancasakti tegal.
- Beauty, A. M. (2014). *Skripsi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) Di Seluruh KAabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta*. universitas kristen duta wacana yogyakarta.
- Cherilina, P., & Mooy, A. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Pembangunan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah*. sekolah tinggi ilmu ekonomi indonesia surabaya.
- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Asri Dwija Putri, I. G. A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia. *E- Jurnal Akuntansi*, 31(2), 401.
- Irmal Suandi. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan*. universitas negeri makassar.
- khilyatizam zam. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Angkatan Kerja, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Solo Raya*. Universitas islam negeri sunan kalijaga jogjakarta.
- Nanang suko purnomo. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung*. universitas lampung.
- Nisya permata sari. (2016). *Pengaruh Jumlah Pendudukan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi*. universitas batanghari jambi.

- Nisya Permata Putri. (2019). *Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi*. Universitas batanghari jambi.
- Nur. Fadlih Arsyad. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Di Kota Makassar*. universitas muhammadiyah makassar.
- Nur Imamah. (2015). *Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah DiProvinsi Jawa Timur*. universitas bayangkara surabaya .
- Pertamaya Sari. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Sebagai Variabel Intervening*. universitas muhammadiyah Palembang.
- Ririn Anggreani. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare*. Institut agama islam negara parepare.
- Siti Morohah. (2019). *Pengaruh Pendapat Asli Daerah, Dana Alokasi Umum*. Universitas Semarang.